

## EVALUASI KEBIJAKAN PENDIDIKAN

**Naila Nur 'Azizah<sup>1</sup>, Meysihinur<sup>2</sup>, Miftah Aziza<sup>3</sup>.**

<sup>1</sup> Pendidikan Agama Islam, Universitas Ahmad Dahlan  
Email: [naila2100031003@webmail.uad.ac.id](mailto:naila2100031003@webmail.uad.ac.id)

<sup>2</sup> Pendidikan Agama Islam, Universitas Ahmad Dahlan  
Email: [meysihinur200031261@webmail.uad.ac.id](mailto:meysihinur200031261@webmail.uad.ac.id)

Pendidikan Agama Islam, Universitas Ahmad Dahlan  
Email: [miftah2100031011@webmail.uad.ac.id](mailto:miftah2100031011@webmail.uad.ac.id)

### **Abstrak.**

*Paper ini menjelaskan beberapa hal terkait dengan evaluasi kebijakan pendidikan. penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dengan jenis kepustakaan (library reserch). Sumber data yang diambil dalam penelitian ini adalah jurnal ilmiah dan artikel yang mendukung dan relevan dengan judul paper ini. Sebuah proses pelaksanaan kebijakan pendidikan tidak terlepas dari perlunya mendapatkan perhatian yang khusus. Elemen-elemen yang ada di dalamnya terdapat beberapa kekurangan yang butuh memperoleh perbaikan. Mulai dari legitimasi, formulasi, dan implementasinya terhadap masyarakat. Oleh karena itu perlu dilakukan sebuah evaluasi agar bisa menghindari kegagalan pada kebijakan pendidikan. Evaluasi kebijakan pendidikan berfungsi guna mengukur berapa besar dari kualitas pengeluaran sebuah kebijakan dan memberikan sebuah masukan kepada para pihak yang berada. Tujuan dari penulisan paper ini, yaitu mengetahui pengertian dari evaluasi kebijakan pendidikan, tujuan dan fungsi evaluasi kebijakan pendidikan, serta model dan pendekatan dalam evaluasi kebijakan pendidikan.*

**Kata kunci : Evaluasi, Kebijakan, Pendidikan**

### **Abstract.**

*This paper explains several things related to the evaluation of educational policies. This study used a qualitative research approach with a type of library (library research). Sources of data taken in this study are scientific journals and articles that support and are relevant to the title of this paper. A process of implementing education policy is inseparable from the need to get special attention. The elements in it have several deficiencies that need improvement. Starting from legitimacy, formulation, and its implementation in society. Therefore it is necessary to do an evaluation in order to avoid failure in educational policies. Evaluation of educational policies serves to measure how much the quality of spending on a policy is and provides input to the parties involved. The purpose of writing this paper is to know the meaning of educational policy evaluation, the objectives and functions of educational policy evaluation, as well as models and approaches in evaluating educational policies.*

**Keywords: Evaluation, Policy, Education**

## **A. PENDAHULUAN**

Evaluasi merupakan salah satu rangkaian kegiatan dalam proses implementasi kebijakan dan program pendidikan. Melalui evaluasi akan diperoleh informasi tentang apa yang telah dicapai dan mana yang belum tercapai dari sebuah program. Informasi hasil evaluasi selanjutnya digunakan sebagai bahan perbaikan program tersebut. Dengan kata lain evaluasi akan akan diketahui efektifitas, efisiensi, kualitas, kinerja, atau produktivitas suatu lembaga dalam melaksanakan programnya sekaligus untuk meningkatkannya. Arti penting dari pelaksanaan kegiatan evaluasi adalah untuk melihat Kembali apakah suatu program dan kebijakan pendidikan itu telah dapat dilaksanakan secara efektif sesuai dengan perencanaan dan mencapai hasil sesuai yang diharapkan. Dari hasil kegiatan evaluasi akan dapat diketahui hal-hal yang telah dicapai dan apakah suatu program dapat memenuhi kriteria yang telah ditentukan. Berdasarkan hasil evaluasi kemudian diambil keputusan apakah program dan kebijakan tersebut akan: (1) diteruskan, (2) direvisi, (3) dihentikan, atau (4) dirumuskan kembali sehingga dapat ditemukan tujuan, sasaran

## **B. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian tertentu yang disebut kajian literatur. Analisis berbagai data konseptual, bersama dengan informasi kualitatif dan kuantitatif dari berbagai karya ilmiah yang diterbitkan sebelumnya, menghasilkan studi tinjauan pustaka. Pendekatan penelitian yang digunakan di sini adalah tinjauan literatur, yang berfungsi sebagai peta jalan untuk menganalisis masalah.

## **C. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **a. Pengertian Evaluasi Kebijakan Pendidikan**

Secara harfiah evaluasi berasal dari bahasa Inggris, *evaluation* yang berarti penilaian dan penaksiran. Dalam bahasa Arab, dijumpai istilah *imtihân* yang berarti ujian dan khataman yang berarti cara menilai hasil akhir dari proses kegiatan. Sedangkan secara istilah, terdapat beberapa pendapat namun pada dasarnya sama hanya berbeda dalam redaksinya saja. Menurut Oemar Hamalik evaluasi yaitu sebagai suatu proses penaksiran terhadap kemajuan, pertumbuhan, dan perkembangan peserta didik untuk tujuan pendidikan. Kemudian menurut Abudin

Nata evaluasi yaitu sebagai proses membandingkan situasi yang ada dengan kriteria tertentu dalam rangka mendapatkan informasi dan menggunakannya untuk menyusun penilaian dalam rangka membuat keputusan. Jadi evaluasi bukan sekedar evaluasi kinerja secara spontan dan insidental, namun evaluasi adalah kegiatan yang menilai sesuatu yang terencana, sistematis dan dengan tujuan yang jelas. Jadi dengan informasi akan diperoleh informasi dan kesimpulan tentang keberhasilan suatu kegiatan, dan kemudian kita dapat menentukan alternatif dan keputusan untuk tindakan berikutnya. Evaluasi pendidikan dapat diartikan sebagai rangkaian tindakan atau proses menentukan nilai yang berkaitan dengan dunia pendidikan. Dengan kata lain evaluasi akan akan diketahui efektifitas, efisiensi, kualitas, kinerja, atau produktivitas suatu lembaga dalam melaksanakan programnya sekaligus untuk meningkatkannya. Arti penting dari pelaksanaan kegiatan evaluasi adalah untuk melihat Kembali apakah suatu program dan kebijakan pendidikan itu telah dapat dilaksanakan secara efektif sesuai dengan perencanaan dan mencapai hasil sesuai yang diharapkan. Dari hasil kegiatan evaluasi akan dapat diketahui hal-hal yang telah dicapai dan apakah suatu program dapat memenuhi kriteria yang telah ditentukan. evaluasi dilakukan untuk mengetahui tingkat keberhasilan dan tingkat kelemahan suatu proses pendidikan (dengan seluruh komponen yang terlibat didalamnya) dalam mencapai tujuan pendidikan yang dicita-citakan.

#### **b. Problem-problem dalam evaluasi kebijakan pendidikan**

Banyak problema yang dialami dalam aktivitas mengevaluasi kebijakan, termasuk kebijakan pendidikan. Problema-problema tersebut ialah sebagai berikut:

- 1) pada saat perumusan kebijakan harus disalahkan karena kurangnya kejelasan tujuan. Kesepakatan dan konsensus ini dipaksakan karena dirancang untuk mempertimbangkan beragam kepentingan yang ada di dalamnya. Tanpa konsesi, bisa menjadi alasan mengapa sebagian besar pihak yang terlibat dalam kebijakan tidak setuju dengan rumusan tersebut. Plus, jika tidak disetujui, itu tidak bisa dipraktikkan. Akibatnya, tujuan yang ditetapkan seringkali ambigu dan dapat berarti hal yang berbeda. meskipun sulit untuk menilai karena konotasi ganda.
- 2) jika tidak jelas apa tujuan dari kebijakan tersebut. Kurangnya kejelasan tujuan disebabkan oleh kompromi dan konsensus yang dipaksakan selama

pembuatan kebijakan. Karena diciptakan dengan mempertimbangkan berbagai kepentingan yang ada di dalamnya, maka diperlukan kesepakatan dan mufakat tersebut. Ini mungkin menjadi penyebab sebagian besar orang yang berkepentingan dalam kebijakan tidak setuju dengan perumusan jika konsesi tidak dibuat. Selain itu, tidak dapat dilaksanakan jika tidak diterima. Akibatnya, tujuan yang ditetapkan biasanya tidak jelas dan memiliki banyak arti. Terlepas dari kenyataan bahwa konotasi ganda membuatnya sulit untuk dievaluasi.

- 3) Apa masalahnya, dari mana asalnya, dan bagaimana manifestasinya, semuanya tidak jelas. Tumpang tindih antara masalah, sumber masalah, dan gejala masalah ini dapat menyebabkan ambiguitas tersebut. Hal ini terjadi karena isu-isu ini dikategorikan sebagai masalah sosial, dengan orang-orang sesekali bertukar pendapat.

### **c. Aktor yang terlibat dalam evaluasi kebijakan pendidikan**

Tergantung pada bagaimana mereka berinteraksi, pembuat kebijakan dan pelaksana mungkin terlibat atau tidak dalam evaluasi kebijakan ini. Dalam kemitraan teknokratis, kekuatan pembuat keputusan sangat kuat, mendekati absolut, dan penilaian mereka harus diterima oleh para pelaksana. Sebaliknya, pembuat kebijakan memainkan peran yang jauh lebih sedikit dalam hubungan pribadi birokrasi karena pelaksana memegang mayoritas otoritas evaluatif. Pada kenyataannya, eksekutor memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap bagaimana kebijakan ini dijalankan. Kemampuan yang diberikan oleh pelaksana kebijakan biasanya menentukan partisipasi administrator dalam evaluasi kebijakan.

Secara formal dan legal, eksekutor bertanggung jawab atas hasil evaluasi kebijakan, tetapi secara praktis, administrator bertanggung jawab. Secara umum, arena mencakup keterlibatan pembuat kebijakan, pelaksana, dan administrator. Jika mereka menawarkan evaluasi di luar kontes, biasanya dalam peran mereka sendiri, atau jika mereka menawarkan evaluasi informal. Sementara itu, keterlibatan aktor kebijakan secara nonformal biasanya terjadi di luar arena. Karena jika mereka benar-benar berniat untuk menyumbang,

Biasanya para pemain formal dan informal berkolaborasi atau mengatur forum selama proses penilaian. Forum ini sengaja dirancang dan didirikan untuk menawarkan analisis kebijakan secara menyeluruh. Dengan adanya forum, temuan

evaluasi akan diperoleh dari berbagai sudut pandang, sehingga menghasilkan hasil yang lebih menyeluruh. Partai politik, organisasi besar, kelompok kepentingan, kelompok perantara, mitra pelaksana kebijakan, individu tertentu, dan media adalah contoh aktor nonformal dalam tinjauan kebijakan.

#### **D. Tujuan dan Fungsi Evaluasi Kebijakan Pendidikan**

Evaluasi kebijakan bisa ditujukan untuk melihat sebab-sebab kegagalan suatu kebijakan, atau untuk mengetahui kebijakan pendidikan dijalankan dan meraih manfaat yang diinginkan. Dalam bahasa sederhana, evaluasi kebijakan pendidikan untuk menilai “manfaat” dari kebijakan pendidikan yang diterapkan. Atas dasar itulah, evaluasi kebijakan pendidikan bisa diarahkan pada tiga komponen; 1) administratif, yaitu mengukur prosedur kebijakan pendidikan secara administratif, biasanya lebih pada aspek finansial; 2) yudisial; yaitu mengukur objek-objek hukum, yang mungkin di langgar atau tidak di langgar; 3) politik, yaitu mengukur pertimbangan politik dari kebijakan pendidikan itu . Hal senada diungkapkan Lester dan Stewart dijelaskan bahwa, evaluasi kebijakan pendidikan bisa dibedakan dalam dua tugas yang berbeda, 1) menentukan konsekuensi yang ditimbulkan dari kebijakan pendidikan dengan cara menggambarkan dampaknya, 2) untuk menilai keberhasilan atau kegagalan dari suatu kebijakan berdasarkan standard atau kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya Lester dan Stewart . Hal senada dijelaskan Subarsono (2010:120) menyebutkan bahwa evaluasi kebijakan memiliki beberapa tujuan: a) menentukan tingkat kinerja suatu kebijakan, dimana melalui evaluasi kebijakan, maka dapat diketahui derajat pencapaian tujuan dan sasaran kebijakan; b) mengukur tingkat efisiensi suatu kebijakan.

Evaluasi kebijakan pendidikan dapat juga dimaknai sebagai usaha untuk mengetahui berapa biaya dan manfaat suatu kebijakan dengan mencermati beberapa aspek, antara lain; a) mengukur tingkat keluaran (outcome) suatu kebijakan. Salah satunya adalah mengukur kualitas pengeluaran atau output dari suatu kebijakan; b) mengukur dampak suatu kebijakan yang dilakukan pada tahap lebih lanjut, evaluasi ini ditujukan untuk melihat dampak dari kebijakan, positif maupun negatif; c) mengetahui tingkat dan bentuk penyimpangan jika terjadi, dengan cara membandingkan antara tujuan dan sasaran dengan pencapaian target; d) bahan masukan (input) untuk kebijakan yang akan datang.

Pemahaman lebih luas dan mendalam tentang tujuan evaluasi kebijakan pendidikan, antara lain mengukur 1) apakah pengaruh program terhadap masyarakat,

misalnya kebijakan bantuan operasional sekolah (BOS), pendidikan gratis, atau intervensi sosial (social intervention) untuk menyelesaikan masalah situasi, keadaan yang dihadapi masyarakat, 2) apakah program telah dilaksanakan sesuai dengan rencana, 3) apakah pelaksanaan program sesuai dengan standar, misalnya program BOS mempunyai standar besarnya bantuan yang berbeda untuk setiap siswa Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama. Apakah penggunaan bisa dipertanggungjawabkannya, sehingga benar-benar semua standar sudah dipenuhi dalam melaksanakan program tersebut, 4) mengidentifikasi dan menemukan mana dimensi program yang jalan, mana yang tidak jalan, 5) pengembangan staf pelaksana program pendidikan, apakah staf mempunyai keterampilan dan kompetensi untuk untuk bekerja?, pelatihan apa yang segera dilakukan, apakah para staf perlu menerima supervisi dan koreksi atas kelemahannya, 6) memenuhi ketentuan Undang-undang dan produk peraturan lainnya. Melengkapi uraian diatas, dapat ditambahkan beberapa tujuan evaluasi kebijakan pendidikan adalah sebagai bahan masukan (input) untuk kebijakan yang akan datang agar dihasilkan kebijakan pendidikan yang lebih baik.

#### **E. Model dan Pendekatan dalam Evaluasi Kebijakan Pendidikan**

Model-model evaluasi pendidikan adalah contoh atau pola acuan suatu proses penilaian dalam mengumpulkan dan menganalisis untuk menentukan taraf kemajuan suatu aktivitas di dalam pendidikan guna menetapkan pencapaian suatu tujuan baik untuk pendidik dan peserta didik. Model evaluasi kebijakan dalam bidang pendidikan bisa mengadopsi pendekatan yang digunakan dalam evaluasi kebijakan publik, ada beberapa model yang bisa diterapkan atau untuk mengevaluasi kebijakan pendidikan, antara lain: 1) goal oriented evaluation model, dikembangkan oleh Tyler, Objek dari model ini adalah tujuan dari program yang ditetapkan sebelum program berjalan dan evaluasi dilakukan secara berkesinambungan, 2) goal free evaluation model, dikembangkan oleh Scriven, Model ini berlawanan dengan model pertama atau bisa dikatakan evaluasi lepas dari tujuan khusus. Sebab, menurut Scriven yang perlu diperhatikan adalah penampilan dari tiap langkah program. Model ini mempertimbangkan tujuan umum yang akan dicapai oleh program, bukan penilaian secara rinci, 3) formatif-sumatif evaluation model, dikembangkan oleh Michael Scriven, 4) countenance evaluation model, dikembangkan oleh Stake, 5) responsive evaluation model, dikembangkan oleh Stake, 6) CSE-UCLA Evaluation Model, menekankan pada “kapan” evaluasi dilakukan, 7) CCIP Evaluation

Model, yang dikembangkan oleh Stufflebeam, 8) discrepancy model, yang dikembangkan Provus

Dalam melaksanakan berbagai model evaluasi kebijakan pendidikan di atas, ada beberapa pendekatan yang bisa digunakan, antara lain: 1) evaluasi semu (pseudo evaluation, maksudnya dalam melaksanakan evaluasi kebijakan pendidikan dapat menggunakan metode deskriptif untuk menghasilkan informasi yang terpercaya dan valid mengenai hasil-hasil kebijakan di bidang pendidikan, tanpa menanyakan manfaat atau nilai dari hasil kebijakan pendidikan tersebut pada individu, kelompok atau masyarakat. Asumsi yang digunakan adalah ukuran tentang manfaat atau nilai merupakan sesuatu yang terbukti dengan sendirinya atau tidak kontroversial, 2) evaluasi formal, maksudnya pendekatan yang bisa digunakan untuk kegiatan evaluasi kebijakan pendidikan menggunakan metode deskriptif untuk menghasilkan informasi yang terpercaya dan valid mengenai hasil-hasil kebijakan berdasarkan sasaran program kebijakan yang telah ditetapkan secara formal oleh pembuat kebijakan pendidikan itu sendiri. Asumsinya adalah sasaran dan target yang ditetapkan secara formal merupakan ukuran yang tepat untuk melihat manfaat atau nilai dari program dan kebijakan pendidikan, 3) evaluasi keputusan teoritis, maksudnya pendekatan evaluasi kebijakan pendidikan yang menggunakan metode deskriptif untuk menghasilkan informasi tentang pendidikan yang dapat dipercaya dan valid mengenai hasil-hasil kebijakan pendidikan yang secara eksplisit diinginkan oleh berbagai stakeholder pendidikan. Dalam hal ini, evaluasi keputusan teoritik berusaha untuk menentukan sasaran dan tujuan yang tersembunyi dan dinyatakan oleh para stakholder pendidikan.

## **SIMPULAN**

Evaluasi pendidikan dapat diartikan sebagai rangkaian tindakan atau proses menentukan nilai yang berkaitan dengan dunia pendidikan. Evaluasi pendidikan islam dapat diartikan sebagai suatu kegiatan menentukan kemajuan profesional dalam proses pendidikan islam dalam ruang lingkup yang terbatas, penilaian dilakukan untuk mengetahui tingkatnya keberhasilan para guru dalam menambah materi ajar keislaman kepada para peserta didik. Sedangkan dalam ruang lingkup luas, evaluasi dilakukan untuk mengetahui tingkat keberhasilan dan tingkat kelemahan suatu proses pendidikan islam (dengan seluruh

komponen yang terlibat di dalamnya) dalam mencapai tujuan pendidikan yang dicita-citakan.

Untuk mengetahui apakah suatu kebijakan dapat dilaksanakan dengan baik atau tidak, untuk mengetahui keuntungan dan kerugiannya, untuk mengetahui sejauh mana implementasinya, untuk mengetahui dampak yang ditimbulkannya, dan untuk mengetahui langkah selanjutnya dalam penanganannya. ketika kebijakan diubah atau diperbaiki, sejumlah kegiatan harus dilakukan. Proses evaluasi yang merupakan akhir dari suatu proses pengembangan kebijakan menghasilkan rekomendasi-rekomendasi untuk perbaikan kebijakan atau perumusan kebijakan selanjutnya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Mulyadi, M. (2012). Riset desain dalam metodologi penelitian. *Jurnal Studi Komunikasi Dan Media*, 16(1), 71-80.
- I. Waseso, "Hakikat Evaluasi dan Asesmen," Univ. Terbuka. <http://repository.ut.ac.id/3807/1/PGTK2303-M1.pdf>, 2014.
- K. A. P. ISKA, "ASESMEN DALAM PEMBELAJARAN." UIN RADEN INTAN LAMPUNG, 2022.
- R. A. Jaysurrohman, M. Supandi, M. T. Wardani, M. Puthaen, dan F. Setiawan, "Problematika dalam Evaluasi Kebijakan Pendidikan di Indonesia," *BINTANG*, vol. 3, no. 2, hal. 215–227, 2021.
- M. Mardiah dan S. Syarifudin, "Model-model evaluasi pendidikan," *MITRA ASHSHIBYAN J. Pendidik. Dan Konseling*, vol.2, no. 1, hal. 38–50, 2018.
- Nasih, A., & Hapsari, T. A. R. (2022). MONITORING DAN EVALUASI KEBIJAKAN PENDIDIKAN. *INTEL: Indonesian Journal of Teaching and Learning*, 1(1), 77-88.
- Jaysurrohman, R. A., Supandi, M., Wardani, M. T., Puthaen, M., & Setiawan, F. (2021). Problematika dalam Evaluasi Kebijakan Pendidikan di Indonesia. *BINTANG*, 3(2), 215-227.